



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Bersidang 2x, MK Akan Putus Hasil Permohonan Uji UU KDRT

Jakarta, 30 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) pada Selasa (30/5), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Sindi Enjelita Sitorus sebagai Pemohon 1 dan Hesti Br Ginting sebagai Pemohon 2. Kedua berprofesi sebagai mahasiswa. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 7 UU KDRT.

Menurut para Pemohon pasal *a quo* tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga dapat menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu hal ini akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami oleh para Pemohon. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Valencya, dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021 akibat memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk. Valencya dilaporkan ke Polda Jabar atas kasus kekerasan dalam rumah tangga psikis. Ketidakjelasan inilah yang menimbulkan kekhawatiran para Pemohon apabila nantinya memiliki kasus yang sama.

Bahwa UU KDRT tidak mempunyai tolak ukur yang jelas seperti apa kekerasan psikis termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikis ini mengakibatkan posisi perempuan yang rentan untuk digugat dan kriminalisasi terhadap perempuan untuk menjadi pelaku dalam konteks kekerasan psikis. Seperti dalam kasus contoh diatas, Valencya melakukannya bukan sebagai bentuk kesengajaan melainkan hanya spontanitas dan tidak bermaksud untuk menyerang psikis korban. Sedangkan dalam kasus kekerasan psikis sesungguhnya kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina berdampak serius apabila dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertentangan dengan UUD 1945 dan *conditionally constitutional* sepanjang ditambahkan frasa “bentuk-bentuk kekerasan psikis: ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negative, atau sikap dan gaya tubuh merendahkan disertai adanya keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang korban kekerasan psikis”.

Para Pemohon disarankan untuk memperbaiki identitas serta mencantumkan norma sebagai batu uji dalam UUD 1945. Selain itu para Pemohon juga diminta untuk menguraikan lebih jelas mengenai alasan permohonannya. Dalam sidang Perbaikan Permohonan (11/5), Leonardo Siahaan selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan telah melakukan perbaikan terkait kekeliruan dalam memperbaiki surat kuasa. Selain itu dirinya juga menambahkan bukti lainnya berupa putusan pengadilan. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)